

MEMAHAMI MASA LAMPAU, MEMBANGUN MASA DEPAN: DUNIA MARITIM, KEBHINEKAAN, DAN SEMANGAT 'KETUNGGALAN'*

Oleh:

Singgih Tri Sulistiyono**

singihtrisulistiyono@gmail.com

singihtrisulistiyono@lecturer.undip.ac.id

I. Pendahuluan

Semenjak memasuki era Reformasi, Indonesia menghadapi kecenderungan semakin merebaknya fanatisme kedaerahan dan primordialisme. Hal ini telah menyulut berbagai konflik horizontal yang merefleksikan rapuhnya ikatan-ikatan sosial yang merekatkan hubungan di antara elemen-elemen sosial-budaya bangsa Indonesia baik yang bersumber dari suku bangsa, agama, ras maupun antar golongan (SARA).¹ Berbagai contoh bisa disebutkan di sini: konflik antara masyarakat Dayak dengan orang Madura di Kalimantan, konflik yang berbau isu keagamaan di Poso dan Ambon, belum lagi adanya letupan-letupan ketegangan dan konflik antar kelompok social dan ras terkait dengan isu membanjirnya imigran ilegal dari RRC (Republik Rakyat Cina), dan sebagainya. Selanjutnya, dinamika social politik yang terjadi di sekitar Pemilihan Umum 2019 juga memiliki andil yang signifikan dalam memperparah berbagai ketegangan horizontal, seperti munculnya wacana khilafah, Islam Nusantara, Islam Garis Keras, sentiment terhadap sebagian keturunan Arab dan sebagainya.

Selain konflik horizontal, Indonesia juga masih harus menghadapi persoalan konflik vertikal. Jika konflik horizontal lebih terkait dengan persoalan budaya, etnik, ras, antargolongan, dan ekonomi, maka konflik vertikal antara daerah dengan pemerintah pusat sangat kental dengan muatan kepentingan politik. Dalam konteks ini, konflik-konflik horizontal berkepanjangan yang yang tidak bisa terselesaikan dengan baik akan mendorong terjadinya konflik vertikal bukan hanya antara elite dengan massa tetapi juga antara daerah dengan pemerintah pusat dalam bentuk gerakan separatism. Hal ini masih dijumpai di Kawasan Papua. Secara sayup-sayup, hal seperti ini juga masih dijumpai di Aceh pada saat konflik Pemilu 2019 terjadi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat Indonesia terjebak dalam ketegangan dan konflik baik horizontal maupun vertikal adalah semakin lunturnya kesadaran terhadap perbedaan. Perbedaan semakin dirasakan dan kadang-kadang juga sengaja dijadikan sebagai pendorong dan penyebab konflik, baik perbedaan etnik, ras, tingkat ekonomi, dan bahkan pilihan politik, serta ambisi-ambisi politik dari kelompok elite tertentu. Salah satu penyebab lunturnya kesadaran terhadap perbedaan adalah karena semakin menipisnya kesadaran dan pemahaman

*Makalah disampaikan pada Seminar *Museums Go to Campus* dengan Tema: "Memajukan Kebudayaan" yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Museum Kepresiden RI Balai Kirti (Semarang: 26 - 29 Agustus 2019).

**Staf pengajar Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro,

¹Luntturnya semangat kebangsaan juga bisa dilihat dari khasanah historiografi Indonesia ketika sejumlah sejarawan meninggalkan konsep "sejarah nasional" (Sulistiyono).

sejarah bangsa Indonesia. Mengapa hal ini bersumber dari melunturnya kesadaran dan pemahaman sejarah? Sebab sesungguhnya sejarah Indonesia telah mengajarkan bahwa kesepakatan untuk membentuk bangsa Indonesia pada waktu itu lebih didorong oleh kesadaran terhadap perbedaan. Bangsa Indonesia terbentuk terutama karena ada kesadaran terhadap perbedaan, kesadaran terhadap pluralitas, bukan karena persamaan. Jika hal ini tidak segera disadari dan diantisipasi maka tidak mustahil bangsa dan negara Indonesia yang merupakan bangsa dan negara konsensus akan lenyap dari peta geopolitik dunia. Oleh sebab itu makalah ini akan membahas beberapa isu terkait dengan akar kebhinnekaan Indonesia dalam sejarah maritim dan pentingnya mewujudkan masa depan Indonesia yang penuh semangat ‘ketunggalan’ atau integrasi bangsa dalam kebhinnekaan.

II. Diaspora Maritim dan Akar Kebhinnekaan

Keberagaman atau pluralitas masyarakat Indonesia merupakan bagian yang inheren perjalanan panjang dari *historical communities* yang mendiami kepulauan Nusantara (Birch: 1989). Keberagaman merupakan semacam takdir bagi bangsa Indonesia. Banyak penelitian menemukan bahwa kepulauan Nusantara khususnya Jawa telah dihuni oleh berbagai jenis manusia purba sejak sekitar 1,8 juta tahun yang lalu dan berlangsung terus hingga munculnya jenis homo sapien sejak sekitar 100 ribu tahun lalu. Para ahli menyatakan bahwa mereka adalah rumpun bangsa Australo-Melanesia yang merupakan nenek moyang dari orang Melanesia di Papua, suku Aborigin Australia dan masyarakat kecil Negrito di Semenanjung Melayu dan Filipina. Setelah berakhirnya zaman es terakhir, yaitu sejak sekitar 17.000 tahun yang lalu, mereka tampaknya telah mulai berubah dari masyarakat berburu dan meramu menjadi masyarakat pertanian yang terkonsentrasi di kawasan yang kering di bagian timur Nusantara. Mereka mampu mengembangkan pertanian untuk membudidayakan talas, tebu, pisang, dan sebagainya (Cribb: 2000).

Berbeda dengan Kawasan kepulauan Indonesia bagian timur yang lebih dahulu dihuni secara menetap oleh berbagai kelompok manusia, bagian barat dan tengah kepulauan Nusantara baru dihuni oleh penduduk yang lebih padat ketika bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia dari daratan Cina bagian selatan dan Taiwan mulai bermigrasi bergerak ke selatan dalam jumlah yang cukup besar sejak sekitar 4000 tahun sebelum masehi. Mereka adalah manusia yang memiliki kelebihan untuk melakukan apa yang disebut sebagai ‘mutasi budaya’. Konsep ini mengacu kepada kemampuan beradaptasi suatu jenis (spesies) terhadap lingkungan baru atau lingkungan yang berubah (Goldoni, 2015).

Sebetulnya orang-orang yang berbahasa Austronesia yang merupakan salah satu nenek moyang bangsa Indonesia pada awalnya bukan merupakan bangsa maritim. Sebelum 4000 SM mereka menghuni kawasan pantai selatan daratan Cina yang terletak di sebelah selatan Sungai Yangse. Meskipun mereka berasal dari daratan Cina tetapi secara etnis dan budaya berbeda dengan orang Han yang awalnya menduduki daratan Cina utara. Sekitar 4000 SM mereka bergerak melintasi laut ke Formosa atau Taiwan. Dari pulau ini mereka terus bergerak menuju Filipina dan kemudian ke kepulauan Indonesia bagian timur. Selanjutnya sekitar 3000 hingga 2000 SM beberapa kelompok pindah dari Taiwan ke pulau-pulau Indonesia bagian

barat dan Semenanjung Melayu dan bahkan mencapai Madagaskar di pantai Afrika Timur. Gelombang migrasi berikutnya bergerak menuju kepulauan Pasifik yang sekarang disebut sebagai Polinesia. Mereka menyebar ke kepulauan Bismarck, di utara Guenia Baru dan wilayah Polinesia Barat yang meliputi kepulauan Fiji, Tonga, dan Samoa. Bahkan, mereka akhirnya mencapai pulau Hawaii, Selandia Baru dan Pulau Paskah (Shaffer, 2015). Perjalanan diaspora yang begitu jauh (sekitar separoh lingkaran bumi) dan perbedaan lingkungan alam yang dihadapi telah melahirkan berbagai kelompok etnik yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru baik dari sisi klimatologis maupun kondisi geografis. Dari bangsa agraris, mereka telah berkembang menjadi bangsa penjelajah laut, pedagang, nelayan, dan sebagainya. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi suku bangsa laut (orang laut).

Keanekaragaman etnik dan budaya di Nusantara di samping disebabkan oleh migrasi yang bergelombang dalam waktu yang sangat panjang, ternyata juga didorong oleh semangat kultural yang unik untuk kepentingan prestis tertentu yang disebut sebagai *founder-focused ideology* (ideologi yang berfokus pada pendiri). Masyarakat Austronesia merupakan masyarakat yang demokratis, namun juga mengakui adanya status-status sosial para anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang merupakan keturunan dari pendiri kelompok dianggap memiliki status lebih tinggi sehingga bagi sebagian anggota kelompok yang menghendaki adanya perubahan status menjadi lebih tinggi cara yang paling mungkin adalah dengan jalan bermigrasi dan mendirikan kelompok-kelompok baru (Bellwood, 2004). Mereka menyebar ke berbagai wilayah yang berbeda dan termasuk pulau-pulau yang berbeda untuk membangun komunitas baru.

Diaspora Austronesia pada awalnya tidak banyak terkait dengan kepentingan perdagangan. Namun demikian setelah mereka menetap di berbagai wilayah maritim yang strategis, perdagangan mulai berkembang. Bukti perdagangan maritim di wilayah intra-Asia Tenggara telah ada sejak 750 SM dalam perdagangan tembikar. Selanjutnya perdagangan maritim juga terus berkembang selama Zaman Perunggu pada 300 SM. Dengan demikian orang-orang Austronesia mampu membangun sistem perdagangan intra-Asia Tenggara sebelum mereka berekspansi ke jaringan perdagangan maritim yang lebih luas antara India dan Cina. Pendapat umum yang sekarang ini berkembang bahwa inisiator perdagangan antara India dan Cina melalui Asia Tenggara adalah orang-orang India. Namun demikian ada kemungkinan besar bahwa orang Austronesia lah yang telah memelopori hubungan perdagangan maritim antara India dan Cina menjelang awal abad masehi. Orang-orang Austronesia dari Selat Malaka berlayar ke utara ke pantai barat Thailand dan kemudian ke Burma. Selanjutnya, mereka berlayar ke barat di sepanjang pantai di Teluk Bengal untuk mencapai India atau mereka juga bisa menggunakan angin musim dan arus di Samudera Hindia untuk mencapai Madagaskar dan pantai timur Afrika. Bahkan beberapa pedagang dan pelaut Melayu membangun pemukiman di Madagaskar.

Sebagian besar penduduk Madagaskar sekarang adalah keturunan Austronesia (D.A. Burney DA, L.P. Burney LP, Godfrey, Jungers, Goodman, Wright, Jull, 2004).

Pada awalnya mungkin diaspora Austronesia di Nusantara dapat berbicara dalam satu bahasa. Namun, selama berabad-abad mereka saling kehilangan kontak sehingga dalam proses sejarah mereka mengembangkan bahasa mereka ke arah yang berbeda. Bahasa dapat berubah dengan cepat meskipun munculnya dialek masih dapat dengan mudah memahami satu sama lain dalam beberapa abad. Namun, hampir tidak ada catatan proses perubahan bahasa di Nusantara sebelum 1800. Di Indonesia modern, ada sekitar 200 rumpun bahasa Austronesia, dan lebih dari 150 keluarga bahasa Papua (Melanesia) (Collins: 156 – 57). Jadi faktor sejarah dan keterpisahan geografis dalam jangka waktu lama telah menyebabkan terbentuknya pluralitas masyarakat Indonesia.

III. Pertumbuhan Kesadaran tentang ‘Ketunggalan’

Kapan kemunculan kesadaran tentang ‘ketunggalan’ di kalangan berbagai komunitas Nusantara tidaklah mudah untuk dipastikan. Namun demikian jika dicermati keberadaan relief yang terpahatkan di Candi Borobudur misalnya, tampak dengan jelas bahwa keberagaman masyarakat dalam harmoni dapat dinikmati sebagai sebuah keindahan dan kedamaian. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat bahwa sebagai bangsa perantau, nenek moyang bangsa Indonesia sudah terbiasa mengenal berbagai orang asing yang mereka jumpai dalam pengembaraannya.

Hingga saat ini, secara substantif kesadaran tentang pentingnya ‘ketunggalan’ dalam kebhinnekaan baru bisa diketahui secara formal oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-14 ketika Mpu Tantular dalam kitabnya yang berjudul *Sutasoma* memunculkan konsep ‘*bhinneka tunggal ika*’ yang maknanya adalah berbeda-beda (plural) tetapi tetap satu (dalam bingkai saling menghargai atau toleransi yang hidup secara berdampingan dalam koeksistensi damai). Hal ini bisa dipahami bahwa pada masa Majapahit itulah terbentuknya masyarakat plural mengalami perkembangan yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Pertama, Majapahit merupakan salah satu contoh terpenting bagaimana sebuah kerajaan yang pada awalnya berbasis etnik (*ethnic-based polity*) telah berkembang dan berekspansi menerobos lintas etnik (*cross-ethnic polity*). Kerajaan ini mulai membangun dirinya sebagai imperium lintas-etnik yang besar. Ekspansi kerajaan Majapahit telah memungkinkan terbentuknya pluralitas dari segi etnisitas dan budaya di dalam wilayah kerajaan Majapahit. Apalagi biasanya sesuai dengan tradisi yang ada, pemerintah pusat menciptakan kondisi di mana banyak bangsawan taklukan atau pun bawahan yang kemudian hidup di kota Majapahit untuk ‘dijawakan’. Demikian juga perkawinan antara bangsawan majapahit dengan para bangsawan local juga merupakan suatu fakta sejarah yang juga diakui dalam banyak tradisi local. Proses ini menjadi factor yang signifikan dalam proses ‘pluralisasi’ masyarakat Majapahit.

Kedua, proses ‘pluralisasi’ masyarakat Majapahit diperkuat dengan semakin banyaknya orang asing yang datang untuk berdagang baik sementara maupun bermukim di kerajaan ini. Mereka berasal dari Timur Tengah, India, Teluk Benggala, Asia Tenggara Daratan, Asia Timur, dan berbagai etnik dari Asia Tenggara Kepulauan. Demikian juga kerajaan Majapahit sudah memiliki beragam penganut

agama (kepercayaan tradisional, Hindu, Budha, Islam dengan berbagai sekte, dan sebagainya), golongan sosial, tingkat ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian tampaknya motto *Bhinneka Tunggal Ika* bukan hanya merefleksikan realitas plural yang ada di dalam masyarakat Majapahit, tetapi juga idealitas 'ketunggalan' atau integrasi yang bersifat multikultural dalam rangka mencapai kedamaian dan kesatuan dalam bingkai otoritas politik Majapahit. Namun demikian pada akhirnya eksperimen politik Majapahit ini mengalami kegagalan untuk mewujudkan '*Tunggal Ika*' dalam integrasi politik kerajaan justru karena friksi dan konflik internal di kalangan kelompok elite. Akhirnya aspek '*Bhinneka*' terus lebih berkembang daripada aspek '*Tunggal Ika*'. Majapahit sebagai 'negara supra-etnik' mengalami disintegrasi yang memunculkan banyak kerajaan yang lebih kecil yang saling bersaing dan berperang.

Di tengah-tengah disintegrasi Majapahit dan disusul kerajaan-kerajaan penggantinya itulah bangsa-bangsa kolonial Barat mulai berdatangan di Nusantara. Dengan memanfaatkan konflik-konflik internal di antara berbagai kekuatan di Nusantara, pada akhirnya mereka mampu menundukkan dan menguasai wilayah kepulauan ini. Penciptaan masyarakat kolonial oleh pemerintah Hindia Belanda semakin mempertajam potensi konflik masyarakat Indonesia yang semakin pluralistik. Manajemen pemerintahan kolonial yang berbasis paradigma adu-domba dikembangkan sehingga tidak memungkinkan munculnya perlawanan yang bersifat massif yang merupakan persatuan dari semua elemen masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda telah terbukti ingin menciptakan masyarakat plural (*plural society*) daripada masyarakat multicultural, *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagaimana yang pernah dirintis oleh Majapahit. Masyarakat kolonial adalah masyarakat plural yang bersifat rasialis dan hierarkhis yang sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik.

Di tengah-tengah fragilitas masyarakat kolonial itu muncullah kekuatan baru yang menjadi antesisen masyarakat kolonial, yaitu datangnya gelombang pengaruh ideologi nasionalisme, sosialisme, dan Panislamisme. Ideologi dan kesadaran baru ini menawarkan model relasi-relasi baru dalam hubungan sosial pada masyarakat kolonial. Ideologi dan kesadaran baru itu mencoba untuk membongkar bangunan masyarakat kolonial yang berbasis SARA dan selanjutnya menawarkan bangunan ikatan baru lintas SARA. Ikatan-ikatan baru yang berbasis ideologi nasionalisme, sosialisme, dan Panislamisme itu akhirnya mengerucut kepada terbentuknya ikatan baru yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia. Satu hal yang menarik adalah bahwa ikatan baru ini tidak hanya merupakan ikatan sosial budaya yang berbasis SARA namun juga mencakup ikatan-ikatan politis yang ingin dibangun. Ikatan kebangsaan Indonesia ini merupakan sebuah ikatan baru yang sedang tumbuh sejak awal abad ke-20 dan secara formal terformulasi pada tahun 1928 dalam peristiwa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Oleh karena aspek ikatan politik inilah maka kesadaran baru tersebut secara *head to head* berhadapan dan berbenturan dengan tatanan kolonial.

Rezim kolonial yang sudah menjadi kekuatan yang establish berusaha untuk melemahkan kembali kesadaran kebangsaan tersebut dengan berbagai cara seperti intimidasi, kekerasan, adu-domba, dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik pemerintah kolonial itu telah menyebabkan perbedaan dan konflik internal di kalangan para aktifis anticolonial. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika secara faktual banyak terjadi persaingan dan konflik yang tajam di antara para aktifis

pergerakan kebangsaan. Dengan demikian di tengah-tengah situasi perkembangan semangat nasionalisme Indonesia, berkembang juga persaingan dan konflik di antara anasir-anasir yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri terutama yang berbasiskan konflik ideologi dan berbagai identitas kultural. Dalam situasi seperti inilah Republik Indonesia lahir. Situasi seperti ini pula yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang sangat berat bagi negara baru yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik dan bahkan tampaknya menjadi semakin mengkhawatirkan.

IV. Nasionalisme 2.0

Pada tahun 2009 Francis Fukuyama seorang ahli politik ekonomi Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin menandai "akhir sejarah", dan “akhir dari negara-bangsa”. Hal itu terkait dengan kecenderungan perjuangan ideologis global antara Blok Kiri dan Blok Kanan telah selesai dan dimenangkan oleh Blok Kanan/Barat yang merupakan kekuatan demokrasi liberal. Dalam hubungan itu, tugas politisi bukan lagi untuk memenangkan pertarungan politik dan militer namun untuk mengelola ekonomi agar bisa memaksimalkan kemanfaatannya bagi semua (Fukuyama, 1989).

Slogan “berakhirnya negara bangsa” sempat mempengaruhi cara berpikir para pemuda yang melihat globalisasi dengan segala macam kemudahan, kesenangan, dan kegemerlapannya sebagai sesuatu yang tampaknya sangat indah di mata pemuda, sedangkan negara seringkali hanya dipandang sebagai penghalang kebebasan dan hanya menarik pajak yang peruntukannya seringkali dipandang tidak jelas. Dengan demikian seringkali kelompok ‘pemuda modern’ semacam ini terhanyut dalam provokasi ‘berakhirnya negara-bangsa’ yang menempatkan negara-bangsa dan nasionalisme tidak penting lagi di masa kini dan mendatang.

Dalam beberapa hal Fukuyama memang benar. Namun demikian perkembangan pasca-Perang Dingin justru menunjukkan gejala lain. Memang komunisme sudah mati. Meskipun negara Republik Rakyat Cina (RRC) masih dijalankan oleh Partai Komunis, namun ini hanyalah sebuah kulit yang aneh yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Karl Marx. Di Barat, ideologi pasar bebas mencapai kemenangan menyusul Perang Dingin dan telah terbukti menjadi sesuatu yang aneh juga, karena bank-bank telah meminta campur tangan negara ketika menghadapi masalah. Hal semacam itu juga pernah menjadi kasus di Indonesia, seperti kasus Bank Century. Pasar bebas seringkali memiliki dampak destruktif yang pada akhirnya negara yang turun tangan untuk memperbaiki. Negara Inggris yang merupakan salah satu dedengkot globalisasi, pasar bebas, dan demokrasi masih saja tetap memerangi Gerakan Irlandia Utara dan mempertahankan integrasi nasional mereka. Dengan demikian dunia yang bebas ideologi yang diprediksikan oleh Fukuyama tidak jadi berlangsung. Semangat nasionalisme dan berbagai bentuk fanatisme masih terus berkembang menyusul berakhirnya perang ideologi selama periode Perang Dingin. Bisa dilihat chauvinisme RRC makin tampak dan diaspora ke luar yang mereka lakukan semakin menjadi gerakan yang sistematis. Di berbagai nagara, bukan hanya negara-negara bekas jajahan, muncul juga gerakan separatis dan keinginan untuk menjadi negara merdeka yang lepas dari ikatan sebelumnya. Demikian juga gerakan-gerakan *mini-nationalisms - ethnic*, gerakan keagamaan dan sebagainya telah muncul dan berhadap-hadapan dengan kekuatan negara-bangsa yang telah *established*.

Bahkan perkembangan mutakhir yang menimbulkan sinisme muncul dari AS sendiri yang dipandang sebagai dedengkot globalisasi dan liberalisme. Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald John Trump dalam pidato politik perdana sebagai kepala negara dan pemerintahannya pada 20 Januari 2017 menekankan kebijakan yang bersifat protektif dan mendahulukan kepentingan nasional AS. Ia mengatakan melalui CNN bahwa (<http://www.antaraneews.com/berita/608029/trump-tekanan-kebijakan-protektif-as>):

"Kebijakan-kebijakan baru akan disampaikan di setiap kota dan negara bagian. Mulai hari ini dan seterusnya visi yang baru akan berlaku di negara kita, yaitu menempatkan Amerika sebagai yang pertama (America First).Kita akan tetap menjalin hubungan yang bersahabat dan beritikad baik dengan berbagai negara dengan tetap mendahulukan kepentingan Amerika. Ini merupakan hak setiap bangsa untuk mendahulukan kepentingan nasionalnya. Kebijakan ekonomi AS yang baru akan mengikuti dua aturan utama, yaitu membeli produk-produk dalam negeri AS (Buy American) dan mempekerjakan warga Amerika (Hire American). Kita akan membuat warga Amerika kembali bekerja dan membangun negara ini dengan tangan warga Amerika. Perlindungan akan kembali di negara ini. Amerika akan mulai berjaya lagi, berjaya lebih lagi dari sebelumnya. Kita akan membawa kembali lapangan kerja (ke dalam negeri) dan kita akan membawa kembali impian-impian kita".

Apa yang disampaikan oleh Trump tersebut merupakan kebijakan yang protektif untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara mereka. Padahal kebijakan proteksi semacam itu jelas bertentangan dengan sistem perdagangan bebas yang menyerahkan geliat ekonomi pada mekanisme pasar yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh negara. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara utama yang sejak awal mendorong penerapan sistem perdagangan besar di dunia. Kebijakan protektif yang diterapkan Amerika Serikat bukan saja menunjukkan sikap 'anti-globalisasi' namun juga anti-imigrasi sebagaimana Trump pernah melarang masuknya orang-orang dari tujuh negara Islam, yaitu Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman yang dipandang sebagai sarang teroris (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>). Sementara itu, proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri (The Economist, 28 January 2017).

Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bagaimana negara-negara maju yang semenjak dominasi mereka melalui kolonialisme langsung mengalami keruntuhnya menyusul Perang Dunia II meneriakkan slogan globalisasi dan pasar bebas. Kini setelah eksperimen mereka mengalami tantangan yang berat mulai melakukan proteksi terhadap kepentingan nasional mereka baik kepentingan kemakmuran bangsa, negara, maupun kuutuhan entitas mereka (integrasi nasional). Dengan demikian tampak jelas bahwa meskipun mereka meneriakkan globalisasi namun pada kenyataannya kepentingan nasional masih tetap mereka dahulukan bahkan kelihatan dengan jelas bahwa slogan globalisasi digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan dominasi. Demikian juga slogan pasar bebas seringkali

digunakan untuk melakukan sanksi dan embargo kepada negara-negara yang mengambil sikap yang bertentangan dengan negara-negara kapitalis. Oleh sebab itu pemikiran dan sikap untuk mengebiri dan mendistorsi eksistensi negara-bangsa Indonesia hanya karena laiah globalisasi dan pasar bebas merupakan sesuatu yang menyesatkan. Jadi eksistensi negara-bangsa Indonesia dan nasionalisme Indonesia masih tetap dibutuhkan di era disrupsi ini. Negara-bangsa Indonesia masih tetap diperlukan sebagai wadah untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bersama, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Nasionalisme dan patriotism tetap diperlukan untuk memumuk ‘ketunggalan’ atau integrasi bangsa Indonesia yang berbhinneka.

Namun demikian perlu ‘nasionalisme baru’ yang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam masyarakat sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini perlu “Nasionalisme 2.0”. Di sini, nasionalisme tidak dapat lagi semata-mata dibangkitkan melalui romantisme sejarah, misalnya: dengan menyatakan bahwa ‘kita merupakan sebuah bangsa yang memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah’ sebagaimana yang dulu sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno (Anderson, 224). Akan tetapi perlu nasionalisme cara baru yang lebih *practical*. Hal ini memang terkait dengan kenyataan bahwa fenomena penjajahan itu pada umumnya dialami bersama oleh elemen bangsa Indonesia, meskipun tentu saja tidak semua kelompok sosial di kepulauan Indonesia pada waktu itu merasa dijajah. Apa yang lebih penting lagi adalah bahwa perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah itu bisa bersifat kontekstual. Bagi ‘generasi sebelum perang’ (*voor de oorlog*), perasaan keindonesiaan dapat ditumbuhkan hanya dengan romantisme sejarah semacam itu, namun pada saat ini ketika zaman telah berubah, generasi telah berganti, maka romantisme sejarah itu tidak dapat lagi sepenuhnya digunakan untuk melanggengkan rasa keindonesiaan. Banyak aspek praksis yang justru menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana negara RI yang dipandang sebagai hasil konsensus luhur yang dibela bersama itu mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan kepada setiap warga negaranya. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahit dan getir penjajahan yang cukup lama, mereka membayangkan bahwa negara Indonesia yang menggantikan negara kolonial itu mampu memberikan kemakmuran secara ekonomi, kemerdekaan secara politik, dan *dignity* serta kebanggaan secara kultural sebagaimana yang pernah dengung-dengungkan oleh Bung Karno dengan Triloginya.

V. Catatan Akhir

Dari uraian di atas dapat diambil poin-poin penting antara lain:

1. Masyarakat Indonesia ‘ditakdirkan’ menjadi masyarakat maritim yang plural melalui proses sejarah yang panjang.
2. Dalam perkembangan sejarahnya, sudah ada upaya untuk menjadikan masyarakat yang berbhinneka atau plural sebagai masyarakat ‘tunggal ika’ yang multikultural dalam rangka membangun kesatuan dalam keberagaman atau bhinneka tunggal ika dalam kerangka kehidupan masyarakat plural yang saling menghargai dan hidup bersama dalam koeksistensi damai.

3. Pada masa kolonial, keberagaman masyarakat Indonesia dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan penguasaan dalam konteks kolonialisme sehingga konflik yang berbau SARA dipertajam.
4. Pergerakan nasional yang muncul sejak awal abad XX telah membawa ke arah perubahan menuju masyarakat multikultural. Namun demikian di sisi lain perbedaan ideologi, pilihan politik, dan berbagai perbedaan kelompok kepentingan kepentingan juga seringkali menjadi antesenden bagi semangat multikultural dan nasionalisme.
5. Nasionalisme sebelum perang (*voor de oorlog*) ternyata tidak efektif lagi untuk menyelesaikan segala persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Diperlukan 'nasionalisme 2.0' yang lebih menekankan pada aspek kehadiran dan peran negara dalam menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan kepada setiap warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Sulistiyono, Singgih Tri. 2009. "Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif", makalah disampaikan pada *Seminar Akademik dengan Tema Historiografi Indonesia Modern* yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 29 Desember).
- Birch, Anthony H. 1989. *Nationalism and National Integration* (London: Unwin Hyman)
- Goldoni, Daniele. "Cultural Mutation: What Media do to Culture", *Citizens of Europe*, 3 (2015), hlm. 381 – 424 (DOI 10.14277/6969-052-5/SE-3-17).
- Bellwood, P. 2004. *The Origins and Dispersals of Agricultural Communities in Southeast Asia*, in: *Southeast Asia: From Prehistory to History* (London: Routledge).
- Burney, DA, Burney LP, Godfrey LR, Jungers WL, Goodman SM, Wright HT, Jull AJ. 2004. "A chronology for late prehistoric Madagascar", *Journal of Human Evolution* 47 (1–2), hlm. 25–63. [doi:10.1016/j.jhevol.2004.05.005](https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.05.005). [PMID 15288523](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15288523/).
- Collins, James T. 2004. "Keragaman Bahasa Dan Kesepakatan Masyarakat: Pluralitas dan Komunikasi", *Jurnal Dialektika* 1 (2 Desember 2014), hlm. 156 – 157.
- Fukuyama, Francis. 1989. "The End of History?", *The National Interest*, Summer 1989, dalam: <https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf> (Diunduh, 9 November 2017).
- <http://www.antaraneews.com/berita/608029/trump-tekanan-kebijakan-protektif-as>
- <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>
- The Economist, 28 January 2017
- Anderson, B. 1983. *Imagined community: Reflections on the origin and spread of nationalism* (London: Verso).
- Cribb, Robert. 2000. *Historical Atlas of Indonesia* (Curzon: Richmond, Surrey).

Shaffer, Lynda Norene. 2015. *Maritime Southeast Asia to 1500* (Routledge, New York).